



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG METEOROLOGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDRI RAMDHANI**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**
3. NHK : **969297**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.010.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
3. Tanah Seluas 1.109 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	623.000.000
1. MOBIL, CHEVROLET TRAILBLAZER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
3. MOBIL, HYUNDAI KONA EV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 413.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	260.716.789



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.893.716.789
III. HUTANG	Rp.	662.853.201
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.230.863.588

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.